

Intervensi Militer Rusia Dalam Tatanan Keamanan Kawasan Timur Tengah: Studi Kasus Konflik di Suriah (2015-2018)

Chairul Fajar, Asep Kamaluddin Nashir
Program Studi Sarjana Hubungan Internasional
Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta
email: chairul.fajar@gmail.com

ABSTRACT

Fluctuations in liquid security polarity and the likelihood of the agenda of interests have created a power contestation followed by security uncertainty in the Middle East. The eruption of the Arab Spring followed by conflict in Syria posed a threat to Russia's national interests by the potential collapse of Syrian government authority. Military intervention later became a step for Russia to overcome the potential threat. It is strongly believed that Russia's military intervention has achieved a number of achievements at once, ranging from game changers to the course of the war in Syria to material and strategic advantages in the scope of the Middle East security order. This research uses the theory of regional security complex and military intervention and concludes that Russian military intervention in Syria has expanded Russia's role in Syria and the Middle East as one of the important players who created variations in the power map in the region while thwarting the design of the US version of the Middle East security.

Keywords: Middle East, military intervention, Russia, security order, Syria

ABSTRAK

Fluktuasi polaritas keamanan yang *liquid* dan saratnya agenda kepentingan telah menciptakan kontestasi kekuatan yang diikuti ketidakpastian keamanan



di Timur Tengah. Meletusnya *Arab Spring* diikuti konflik di Suriah memunculkan ancaman terhadap kepentingan nasional Rusia oleh potensi runtuhnya otoritas pemerintahan Suriah. Intervensi militer kemudian menjadi langkah Rusia guna mengatasi potensi ancaman tersebut. Sangat diyakini intervensi militer Rusia ini memperoleh sejumlah capaian sekaligus, mulai dari *game changer* jalannya perang di Suriah hingga keuntungan material dan strategis di lingkup tatanan keamanan Timur Tengah. Penelitian ini menggunakan teori *regional security complex* dan intervensi militer dan menyimpulkan bahwa intervensi militer Rusia di Suriah telah memperluas peranan Rusia di Suriah dan Timur Tengah sebagai salah satu pemain penting yang menciptakan variasi peta kekuatan di kawasan sekaligus menggagalkan rancangan tatanan keamanan Timur Tengah versi AS.

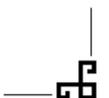
Kata kunci: intervensi militer, Rusia, Suriah, tatanan keamanan, Timur Tengah

Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri Timur Tengah merupakan kawasan dengan problematika dan interaksi yang sangat kompleks, meliputi isu laten Israel-Palestina hingga kontemporer sejak *Arab Spring*: krisis Yaman, perpecahan Saudi-Qatar, rivalitas Iran vs aliansi anti-Iran (Arab Saudi-Israel-AS) hingga konflik Suriah. Meletusnya konflik di Suriah menjadi babak lanjut dari *Arab Spring* yang melanda Timur Tengah. Fenomena *Arab Spring* di beberapa negara yakni Tunisia 2010, Mesir 2011, Libya 2011 sukses menurunkan rezim otoriter yang telah lama berkuasa.

Sementara itu, di Suriah, gerakan *Arab Spring* awalnya bertujuan memprotes dan menuntut perubahan terhadap sistem politik pemerintahan Bashar al-Assad. Gerakan ini awalnya diklaim berjalan dengan damai dan tertib namun mendapat respons koersif pemerintah Suriah sehingga berkembang menjadi suatu gerakan perlawanan bersenjata dari sejumlah faksi dengan latar belakang berbeda (Sinan al-Hawat, 2015: 30). Situasi semakin rumit ketika faksi-faksi bersenjata tersebut mendapatkan dukungan aktor-aktor eksternal seperti AS serta mitra strategisnya di kawasan (Israel, Arab Saudi, Qatar, Yordania). Dukungan asing membuat faksi-faksi tersebut sempat mengontrol hampir sebagian besar wilayah Suriah termasuk penguasaan atas sumber daya perekonomian strategis yang digunakan untuk mendanai aktivitas bersenjata mereka (Shaheen, 2015).

Di tahun 2014, kontrol pemerintah Suriah terhadap total wilayahnya merosot hingga tersisa 20% (Strack, 2015). Hal ini diyakini sebagai akibat dari dukungan aktor-

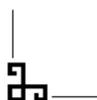


aktor eksternal terhadap faksi-faksi bersenjata anti-Assad (FSA, Islamic Front Al Nusra, dan lain-lain). Situasi semakin mencapai kritis ketika ISIS berhasil menancapkan kekuatannya setelah mengeksploitasi kekacauan di Suriah. Menguatnya ISIS mendorong AS meningkatkan bantuan persenjataan ke barisan faksi oposisi yang diklaim AS sebagai faksi moderat. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa bantuan ini justru semakin memperkuat ISIS akibat penyelewengan dan malah mendorong sejumlah faksi-faksi FSA berpaling ke barisan ISIS (Conflict Armament Research, 2017). Pembelotan faksi-faksi FSA ini memaksa AS memalingkan dukungan ke SDF (*Syrian Democratic Forces*) yang mayoritas anggotanya berasal dari etnis Kurdi. Langkah ini mendapat protes keras dari Turki sebagai sekutu AS karena berpotensi memperkuat gerakan politik Kurdi yang akan mengancam keamanan Turki yang tengah dilanda insurjensi Kurdi sejak 1978 (Andersson, 2015).

Berdasarkan situasi yang telah diuraikan, pemerintah Suriah pada tahun 2014 tengah berada dalam posisi sulit dan hampir membawa negara tersebut ke ambang *failed state*. Destabilisasi yang dilakukan oleh milisi-milisi bersenjata secara berkelanjutan membuka potensi jatuhnya pemerintahan Suriah yang artinya mengancam negara-negara mitra strategisnya, terutama Rusia. Rusia telah lama menjalin kemitraan erat dengan Suriah, yaitu sejak Perang Arab-Israel 1967 lewat 'pendahulu'-nya, Uni Soviet (Machairas, 2017: 5). Saat itu Suriah tengah menghadapi ketidakpastian keamanan di kawasan dengan adanya AS di sisi Israel dan rivalitasnya dengan Irak-Turki. Situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh Soviet hingga keruntuhannya akhir Perang Dingin (Wallsh, 2013: 111-115).

Runtuhnya Soviet kemudian menjadi lembaran baru bagi kemitraan Rusia-Suriah di tahun 1992. Kekhawatiran akan unilateralisme dan hegemoni AS di Kuwait (1991), Afghanistan (2001) dan Irak (2003) mendorong Rusia-Suriah meningkatkan kembali kemitraan strategisnya (Hadar, 2005). Peningkatan kemitraan strategis ini kemudian berlanjut ketika ketidakpastian situasi keamanan di Suriah dan menguatnya milisi-milisi bersenjata Suriah, termasuk kelompok-kelompok teroris seperti ISIS dan Al Nusra (Al Qaida). Rusia berusaha menopang pemerintah Suriah lewat dukungan politik dan payung diplomatik melalui status keanggotaannya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Perlindungan ini diyakini sebagai penyebab gagalnya penerapan sanksi dan intervensi militer pimpinan AS (Allison, 2013).

Memasuki 2015 posisi pemerintah Suriah semakin 'kritis' akibat menguatnya entitas non-negara (ISIS, FSA, SDF), mengancam kedaulatan pemerintah Suriah dan Suriah sendiri sebagai institusi negara serta agenda kepentingan strategis Rusia. Situasi ini mendorong Rusia melakukan inisiatif lewat intervensi militer



guna 'menyelamatkan' Suriah dari kehancuran. Pada September 2015, Rusia resmi memasuki kancah konflik Suriah melalui pengerahan angkatan bersenjata, baik di darat maupun udara.

Dalam tulisan ini, penulis akan membahas mengenai hasil dan implikasi dari intervensi militer Rusia di Suriah terhadap tatanan keamanan di kawasan dengan menggunakan teori *Regional Security Complex* dan intervensi militer. Penelitian dilakukan dengan melakukan studi literatur dokumen skripsi, buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan tema ini. Selanjutnya, penulisan artikel ini akan dibagi dalam beberapa bagian, mulai dari landasan teori, perubahan konfigurasi kekuatan di Timur Tengah, intervensi militer Rusia di Suriah, dan kesimpulan.

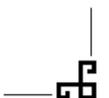
Landasan Teori

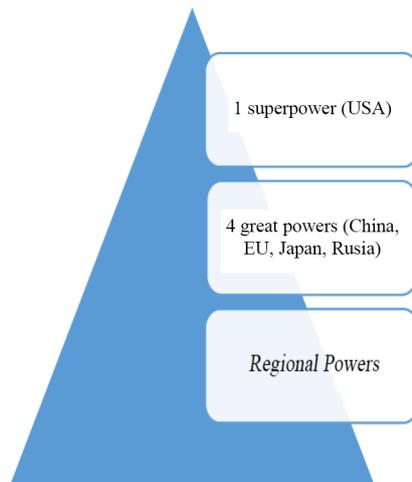
Regional Security Complex Theory (RSCT)

Desentralisasi keamanan dunia pasca-Perang Dingin tidak dapat dipungkiri telah membawa kawasan-kawasan menentukan 'arahnya sendiri'. Dalam tulisannya, Buzan dan Waever mendefinisikan bahwa setiap kawasan memiliki keidentikan masalah keamanan sehingga menghasilkan interdependensi sehingga menjadi fondasi terbentuknya suatu RSC. Pemahaman mengenai keamanan RSC ini telah dijelaskan lebih mendalam oleh Buzan yakni: "*a set of units whose major processes of securitisation, desecuritisation, or both are so interlinked that their security problems cannot reasonably be analysed or resolved apart from one another.*" (Buzan & Waever, 2003: 44)

Agar bisa membedakan keamanan global dan keamanan kawasan, kita dapat melihat cakupan proyeksi kekuatan negara, apakah dapat diperhitungkan atau tidak. Proyeksi kekuatan ini berkaitan dengan distribusi kekuatan yang berlangsung dari tingkat global hingga kawasan. Buzan mengidentifikasi struktur kekuatan ini dengan membaginya menjadi tiga kategori, yakni: (1) *superpower*, (2) *greatpower*, (3) *regionalpower*. Hal tersebut secara lebih lengkap digambarkan melalui ilustrasi berikut:

Identifikasi *superpower* merujuk pada AS sebagai kekuatan tunggal dengan kemampuannya memproyeksikan kekuatan dan nilai-nilainya di seluruh belahan dunia. Di level berikutnya ada *greatpower*, yaitu China, Uni Eropa, Jepang, Rusia, yang hanya memiliki beberapa kapabilitas dari *superpower*. Terakhir, *regionalpower* dengan fokus kekuatan di kawasan. Melihat desentralisasi keamanan global ke kawasan, maka kekuatan *superpower* dan *greatpower* memiliki kemungkinan untuk





mempengaruhi konstelasi keamanan di level kawasan (Buzan & Waever, 2003: 35-46).

Identifikasi struktur kekuatan dalam desentralisasi keamanan dari *world-centric* ke *regional-centric* telah membawa konsekuensi terhadap pembentukan konfigurasi keamanan suatu kawasan melalui gagasan *Power Operates on Regional Level*. Melalui gagasan ini, segala bentuk pergeseran polaritas di kawasan

terjadi lewat mekanisme *balance of power* sebagai pembentukan konfigurasi keamanan kawasan. Adanya *balance of power* ini juga menjadi bagian dari model konfigurasi keamanan dalam waktu yang lama tapi tidak permanen; tanpa sedikit banyak dipengaruhi yang terjadi di tatanan global, konfigurasi di kawasan dapat tetap terus berkelanjutan.

Menurut Buzan dan Waever, ada empat model konfigurasi keamanan kawasan: *Standard*, *Centred*, *Great Power* dan *Super Complexes* dimana setiap konfigurasi ini memiliki ciri-cirinya sendiri. *Standard* merupakan kawasan anarki dan multipolar dengan ketidadaan kekuatan dominan di sana. Sedangkan *Centred* adalah penumpukan kekuatan pada satu negara di kawasan, contoh nyata adalah AS di kawasan Amerika Utara. *Greatpower* terkonfigurasi dengan dua atau lebih kutub kekuatan di kawasan dengan *greatpower* sebagai sentral, misalnya Eropa pada tahun 1914 dan 1938. Terakhir, *Super Complexes*, dimana interaksi yang sangat kuat di dalam kawasan melebar ke sekitarnya dengan melibatkan aktor global, misalnya Asia Timur dengan rivalitas Jepang-Tiongkok, Korea Utara-Korea Selatan, dan kehadiran AS (Buzan & Waever, 2003: 50-54).

Konfigurasi kawasan tidak terlepas dari interaksi kekuatan di dalamnya melalui bentuk *enmity-amity* yang memungkinkan terbentuknya formasi konflik, *security regime* atau *security community*. Bagi kekuatan global bentuk interaksi ini menjadi tolak ukur dalam menentukan keberpihakan terhadap salah satu *regionalpower* di kawasan sekaligus memainkan peranan di kawasan. Demikian pula, negara-negara kekuatan minor juga dijadikan tolak ukur untuk melakukan *bandwagon* terhadap kekuatan yang lebih kuat yang diiringi hubungan antar-*regionalpower*, melengkapi struktur keamanan di kawasan (Buzan & Waever, 2003: 55)

Intervensi Militer

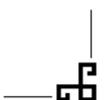
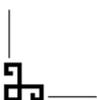
Pada prinsipnya, intervensi merupakan upaya suatu negara untuk ikut mencampuri urusan domestik negara lain (Mauna, 2000). Dengan kata lain, intervensi adalah sikap sebuah negara terhadap negara lain untuk ikut campur dalam lini yang luas, mulai dari ekonomi, politik, militer, hingga kemanusiaan. J.G Starke menggolongkan intervensi berdasarkan model dan jangkauannya, yakni:

1. Intervensi internal, yaitu tindakan campur tangan yang dilakukan suatu negara terhadap persoalan domestik negara lain. Intervensi model ini seringkali ditemukan, mulai dari kasus konflik sipil hingga sengketa politik dalam negeri.
2. Intervensi eksternal, yaitu tindakan campur tangan negara terhadap urusan luar negeri negara lain.
3. Intervensi *punitive*, yaitu tindakan pembalasan suatu negara kepada negara lain sebagai imbalan atas kerugian yang dialami. Kerugian yang dimaksud dari intervensi model ini adalah kebijakan suatu negara yang dianggap mengancam keamanan negara tersebut maupun dalam kasus tertentu seperti nilai-nilai universal (HAM).

Sementara itu, lebih spesifik lagi, intervensi militer merupakan tindakan negara dalam menggunakan instrumen kekerasan secara terbuka lewat pengerahan militer suatu negara di luar wilayah teritorialnya meliputi matra darat, laut, dan udara (Tillema & Wingen, 1982). Menurut seorang ahli strategi, Von Clausewitz, kekuatan militer digunakan sebagai cara dalam mencapai tujuan-tujuan politik sebagai hasil perolehan akhir dari intervensi militer itu (Sullivan & Koch, 2009).

Intervensi militer menjadi strategi suatu negara dengan kecenderungan mengubah keseimbangan kekuatan dalam konflik internal suatu negara. Dalam pandangannya, Gent menyatakan dalam melakukan pergelaran kekuatan militer dan konflik internal, negara pengintervensi mempertimbangkan untung-rugi serta capaian berbagai kepentingan strategis di dalamnya. Kalkulasi serta pertimbangan ini menjadi penentu bagi pihak pengintervensi untuk mendukung pihak pemerintah atau pemberontak dalam konflik internal di suatu negara (Gent, 2008: 714).

Suatu negara atau pemerintahan bisa meminta intervensi militer dari pihak lain ketika menghadapi kelompok pemberontak yang lebih kuat yang berpotensi mengancam kestabilan pemerintah sebagai otoritas resmi negara tersebut. Suatu pemerintahan yang menghadapi bahaya semacam ini akan berupaya melakukan



penyeimbangan kekuatan dengan menarik aktor kekuatan lain untuk membantunya. Sebagai otoritas resmi yang sah dan diakui masyarakat internasional, suatu pemerintahan memiliki legitimasi meminta intervensi militer pihak ketiga lewat posisinya yang terstruktur dan terorganisir.

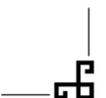
Kondisi ini juga didukung oleh gagasan resolusi konflik, yaitu bahwa negara memegang peranan penting dalam proses *peacebuilding* karena statusnya sebagai struktur yang dianggap mampu untuk menguatkan dan menjamin perdamaian sekaligus mencegah konflik terulang kembali. *Peacebuilding* tersebut diperoleh melalui mekanisme pemulihan ketertiban, pelatihan kapasitas aparat keamanan, promosi hak asasi manusia serta reformasi dan penguatan institusi pemerintahan (Fetherston, 2000: 201-203). Maka apabila suatu negara menjalankan kebijakan intervensi militer terhadap negara lain dan berpihak pada pemerintahan di negara lain tersebut, tujuan tidak langsung yang ingin dicapai adalah menciptakan perdamaian dengan membantu pemerintah menguatkan kedaulatannya guna memulihkan *law and order*. *Peacebuilding* merupakan fondasi dasar dalam tahapan *peacesettlement* guna menjalankan proses lainnya yakni *peacemaking* (memindahkan konflik ke dialog) dan *peacekeeping* (upaya demobilisasi kombatan, reintegrasi kombatan hingga amnesti). Sehingga bukan tidak mungkin *peacebuilding*, *peacemaking* dan *peacekeeping* dapat berjalan secara beriringan dengan intervensi militer itu sendiri.

Nolte menyebutkan sejumlah kriteria yang mesti dipenuhi oleh pemerintah sebelum mengundang pihak eksternal untuk mengintervensi, yakni (Nolte, 2011):

- a. Pemerintah harus menunjukkan efektivitasnya sebagai otoritas resmi melalui simbol-simbol yang dianggap 'representatif' seperti teritorial, ibukota, kantor kedutaan resmi dan representasi delegasi.
- b. Pemerintah berkedudukan di wilayah otoritasnya (bukan *government in exile*, *phoney government* atau *government-in-waiting*).
- c. Negara yang mengundang harus satu suara (pemerintahan tidak terfragmentasi).

Konstelasi Tatahan Keamanan di Timur Tengah

Tidak dapat dipungkiri Timur Tengah menyandang status sebagai RSC *Standard* sesuai gagasan RSC Buzan yang disebabkan absennya kekuatan dominan kawasan dan ketiadaan *regional order*. Absennya kekuatan dominan dapat dibuktikan dari peta kekuatan di kawasan dimana tidak ada satu pun negara berstatus kekuatan tunggal

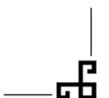


paling menonjol di Timur Tengah. Justru Timur Tengah terfragmentasi ke sejumlah kekuatan terpisah membentuk suatu koalisi *ad hoc* berlandaskan pragmatisme. Meskipun terdapat institusi seperti GCC (*Gulf Cooperation Council*), namun GCC belum dapat memainkan peranannya untuk menentukan dinamika di kawasan yang didominasi koalisi *ad hoc*. Ketiadaan kekuatan dominan dan fragmentasi ini juga semakin diperkuat dengan kehadiran kekuatan global (AS dan Rusia) dalam interaksi kekuatan politik di kawasan Timur Tengah melalui aliansi maupun kemitraannya dengan negara-negara di kawasan yang membentuk arsitektur keamanan kawasan.

Fenomena *Arab Spring* telah meruntuhkan *status-quo* arsitektur keamanan di kawasan melalui keruntuhan rezim-rezim otoriter yang telah lama berkuasa. Runtuhnya *status-quo* ini menandai dimulainya *struggle for power* di kawasan dalam memperebutkan kontrol pengaruh atas Timur Tengah. Perebutan ini telah membawa seluruh kawasan ke dalam disintegrasi yang melibatkan berbagai aktor dan entitas politik, dari negara hingga non-negara, mulai dari elemen nasionalis, demokrasi-sekuler, pro-Islamis, hingga radikal ekstrem.

Disintegrasi ini semakin diperparah oleh mundurnya AS dari peranannya sebagai *superpower* untuk menciptakan keseimbangan kekuatan dan mengatur kembali tatanan keamanan Timur Tengah pasca-*Arab Spring*. Di saat bersamaan AS juga tengah terfokus di kesepakatan P5+1 JCPOA terkait nuklir Iran. Situasi ini seolah mengaburkan sekaligus membatasi fokus peranan AS di Timur Tengah yang hanya mengandalkan langkah diplomasi koersif lewat sanksi internasional sekaligus mempersenjatai sekutu serta mitra strategisnya di kawasan. Langkah ini semakin menjauhkan peranan AS di kawasan dan meninggalkan Timur Tengah dalam kekacauan tak berkesudahan (Hazbun, 2018).

Kekacauan ini menciptakan kompetisi di antara negara-negara di kawasan dalam sejumlah polarisasi kekuatan. Polarisasi kekuatan ini terbentuk oleh interaksi kekuatan-kekuatan di dalamnya, baik yang berlandaskan *enmity* (rivalitas) maupun *amity* (kooperatif), namun lebih banyak didominasi oleh interaksi *enmity*. Di Timur Tengah terdapat beberapa polarisasi kekuatan berbeda, yang pernah maupun masih mendominasi kawasan. Pertama, rivalitas Arab-Israel di masa Perang Dingin yang melibatkan koalisi militer negara-negara Arab di *Levant* (Yordania-Irak-Mesir-Lebanon-Suriah) melawan Israel dalam tiga serangkaian perang, yakni Perang Arab-Israel 1948, Perang 6 Hari 1967 dan Perang *Yom Kippur* 1973. Dari tiga perang ini menyisakan Suriah sebagai satu-satunya negara koalisi Arab yang belum berdamai dengan Israel (Makdisi, 2018).



Kedua, rivalitas Saudi-Iran. Persaingan dua kekuatan ini mempolarisasi tatanan keamanan di Timur Tengah dan menjadikan Timur Tengah sebagai arena kompetisinya guna mencapai dominasi di kawasan sekaligus membangun Timur Tengah sesuai *blueprint* versinya (Alikani & Zakerian, 2016). Perlu diketahui apabila dilihat dari peta politik di kawasan, baik Saudi maupun Iran merupakan dua kandidat *regionalpower* terbesar pasca-Arab Spring 2011. Hal ini dikarenakan ketika negara-negara *regionalpower* seperti Mesir-Suriah-Libya menyusut proyeksi *power*-nya akibat pergolakan internal, Saudi-Iran berhasil *survive* dan menjaga stabilitas posisinya dari arus pergolakan *Arab Spring*. Posisi ini telah menciptakan suatu *struggle for power* baru melahirkan Perang Dingin di kawasan dan aktif menyokong aktor-aktor mitra dalam aktivitas *struggle for power* internal mereka. Bahrain menjadi negara pertama arena pertarungan pengaruh Saudi-Iran dimana Saudi mendukung penguasa Bahrain lewat intervensi militernya di 2011 dan berhasil mengamankan posisi penguasah sah Bahrain membawanya ke orbit pro-Saudi (Gray, 2014).

Arena kedua adalah Suriah. Suriah menjadi arena menentukan bagi Saudi-Iran. Iran mendukung pemerintah Assad sedang Saudi mendukung anti-Assad. Jika pemerintah Assad berhasil digulingkan, hal serupa akan terjadi di Iran yang mengancam keamanannya. Sebaliknya jika Iran menang maka Suriah diprediksi akan menjadi pijakan Iran dalam membentangkan pengaruhnya di Timur Tengah yang berpotensi mengancam bagi Israel-AS-Saudi di kawasan.

Arena ketiga adalah Yaman. Situasi politik di Yaman terfragmentasi menjadi kubu pro-Saudi (pemerintah Hadi) dan anti-Saudi (Houthi) didukung Iran. Perpecahan ini berlanjut dalam konflik bersenjata, menyeret Saudi-Iran turut serta di dalamnya. Saudi menyokong pemerintah Hadi sementara Iran diduga membantu Houthi. Agenda Houthi menggulingkan pemerintah Hadi dipandang Saudi sebagai ancaman ekspansi pengaruh Iran di 'halaman belakang'-nya. Kekhawatiran ini mendorong Saudi membangun aliansi di kawasan dan di luar kawasan. Di Timur Tengah, Saudi merangkul Mesir-Yordania-Kuwait-Lebanon-Maroko-Bahrain-Yaman-Qatar-Oman-UAE dalam kerangka aliansi militer didukung AS-Israel-Inggris yang berbagi pandangan akan ancaman Iran (Soage, 2017). Sementara di luar kawasan, Saudi berinisiatif membentuk *balancing* membangun aliansi IMCTC (*The Islamic Military Counter Terrorism Coalition*) pada akhir 2015 yang terdiri dari 40 negara-negara muslim di seluruh dunia. Inisiatif langkah Saudi ini secara politis merupakan cara menjauhkan pengaruh Iran sebagai negara muslim, karena saat bersamaan AS sedang terlibat negosiasi JCPOA yang akan kembali memperkuat Iran akibat dilepasnya sanksi internasional (Mann, 2017).

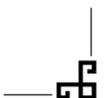
Tiga polaritas ini membuktikan Timur Tengah merupakan kawasan anarki sebagaimana Buzan dalam salah satu gagasan RSCT-nya. Polaritas keamanan ini terjadi silih berganti dengan masa yang relatif lama, tapi tidak permanen dan diwarnai oleh interaksi *amity-enmity* antaraktor di dalamnya sekaligus penyesuaian interaksi dengan kekuatan eksternal dalam rangka pencapaian keseimbangan posisi di kawasan.

Agenda Rusia di Timur Tengah

Kembalinya Rusia dalam kancah perpolitikan Timur Tengah diaktualisasikan lewat strategi geopolitiknya menjadi kejutan bagi khalayak internasional, khususnya AS. Langkah Rusia ini menjadi tantangan baru bagi AS selaku hegemon di Timur Tengah. Sejak 2005 Rusia berupaya menciptakan momentum dalam proyeksi kekuatannya di Timur Tengah lewat safari politik dan bergabung ke OIC (*Organization of Islamic Cooperation States*). Namun sayangnya langkah tersebut belum mampu mencapai momentum yang dicari. Momentum itu baru dapat diperoleh ketika *Arab Spring* 2011 telah menimbulkan kekacauan di kawasan akibat runtuhnya institusi negara dan eskalasi konflik bersenjata diikuti berkembangnya kelompok-kelompok *pseudo-states* (ISIS, dan lain-lain). Situasi ini menciptakan ketidakpastian keamanan yang dalam pandangan Rusia merupakan potensi berbahaya, terutama potensi bagi 'pihak yang tidak diinginkan' (kelompok radikal ekstrem) untuk mencapai agendanya meradikalisasi Timur Tengah (Zyvagelskaya, 2016: 79-83).

Bagi Rusia, Timur Tengah merupakan *hotbed* bagi kelompok-kelompok radikal ekstrem transnasional seperti Al-Qaeda dan ISIS. Dikhawatirkan perkembangan mereka akan memunculkan persoalan keamanan baru bagi Rusia, khususnya kawasan Kaukasus yang sebelumnya telah berkali-kali melakukan upaya pemberontakan melawan Moskow. Sepanjang 1994-2000 kawasan Kaukasus diliputi sentimen identitas Muslim versus rezim Moskow, terutama yang berkembang di tengah etnis Chechnya. Intensifitas operasi keamanan Rusia di Kaukasus semakin mempersempit pergerakan kelompok radikal di Kaukasus. Di saat bersamaan konflik di Suriah telah menarik orang-orang Chechnya untuk bergabung dengan sejumlah faksi radikal ekstrem di Suriah.

Bergabungnya orang-orang Chechnya ke kelompok radikal ekstrem di Suriah sebagai *foreign fighters* berpotensi mengancam keamanan Rusia maupun negara-negara di sekitarnya yang tergabung dalam CIS (Moldova-Azerbaijan-Kazakhstan-Tajikistan) mengingat populasi kawasan ini mayoritas beragama Islam. Apalagi,



foreign fighters terbanyak setelah Tunisia dan Arab Saudi ternyata berasal dari kawasan ini, sebagaimana terlihat dalam data di bawah ini.

Table 1: Ranking of ISIS Foreign Fighters by Country Based on Official Count

Country	Count		Country	Count	
	Official	Non-Official		Official	Non-Official
1. Tunisia	6,000	7,000	26. Spain	133	250
2. Saudi Arabia	2,500	-	27. Canada	130	-
3. Russia	2,400	-	28. Denmark	125	125
4. Turkey	2,100	-	29. Australia	120	255
5. Jordan	2,000	2,500	30. Azerbaijan	104	216
6. France	1,700	2,500	31. Malaysia	100	-
7. Morocco	1,200	1,500	32. Philippines	100	-
8. Lebanon	900	-	33. Albania	90	150
9. Germany	760	-	34. Italy	87	-
10. United Kingdom	760	-	35. Norway	81	60
11. Indonesia	700	500	36. Finland	70	85
12. Egypt	600	1,000	37. Pakistan	70	330
13. Belgium	470	470	38. Sudan	70	100
14. Tajikistan	386	-	39. Switzerland	57	-
15. Bosnia	330	217	40. Israel	50	-
16. Austria	300	233	41. Ireland	30	30
17. China	300	-	42. India	23	45
18. Kazakhstan	300	-	43. New Zealand	7	6
19. Sweden	300	300	44. Brazil	3	-
20. Kosovo	232	-	45. Madagascar	3	-
21. Netherlands	220	210	46. Singapore	2	-
22. Maldives	200	60	47. Cambodia	1	-
23. Algeria	170	225	48. Moldova	1	-
24. United States	150	250	49. Romania	1	-
25. Macedonia	146	100	50. South Africa	1	-

Note: Based on data from Barrett (2014) and The Soufan Group (2015).

Tabel di atas menunjukkan data statistik *foreign fighters* dari sejumlah negara di dunia. Rusia berada di urutan ke-3 diikuti negara-negara lain dalam 10 besar yakni Turki-Yordania-Perancis-Maroko-Lebanon-Jerman-Inggris (Benmelech & Klor, 2018: 33).

Intervensi Militer Rusia di Suriah

Negara-negara pro-oposisi (AS-Saudi-Qatar-Turki) menjadikan mundurnya Assad sebagai persyaratan mutlak sebelum perundingan politik dilanjutkan. Hal ini ditolak oleh pemerintah Suriah sehingga memunculkan kebuntuan di meja politik. Ketiadaan pilihan alternatif mendorong aktor-aktor kembali menggunakan penyelesaian militer di lapangan. Hingga 2014, pemerintah Suriah bersama Iran dan milisi Hezbollah belum memperoleh hasil nyata yang mampu mengubah arah jalannya konflik (Marks, 2018). Justru situasi semakin mengkhawatirkan ketika ISIS secara cepat menguasai sejumlah wilayah karena didukung oleh aliran *foreign fighters* dari seluruh dunia tanpa henti. Sementara itu, militer Suriah telah mengalami kelelahan dan kekurangan sumber daya akibat perang berkepanjangan (Choucair, 2013). Kebuntuan politik dan memburuknya situasi militer di lapangan mendorong

pemerintah Suriah mencari penyelesaian eksternal, yaitu dengan meminta intervensi militer dari Rusia.

Intervensi militer Rusia ini merupakan strategi Rusia guna mencegah runtuhnya institusi negara oleh milisi-milisi bersenjata sekaligus memulihkan dan memperkuat pemerintah Suriah dalam meraih kembali otoritas wilayahnya sebagaimana dalam tiga pilar kerangka *peace settlement* (*peacemaking, peacebuilding, peacekeeping*). Berkaca pada pengalaman di Somalia-Afghanistan-Libya-Irak, institusi negara yang lemah dan tidak berdaulat akan menciptakan *power vacuum* yang akan berpotensi diisi oleh kelompok radikal ekstrem dan milisi bersenjata. Apabila sebagian wilayah negara dikontrol kelompok bersenjata, dapat dikatakan negara sudah kehilangan kedaulatannya dan akan berdampak terhadap kegagalan menjalankan tugas-fungsi pokok institusi negara dalam menyediakan perlindungan dasar bagi warganya: perlindungan, keamanan, kesejahteraan. Kondisi ini telah membawa Suriah ke ambang *'failed state'* (Kompaniets, 2016).

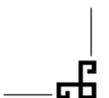
Dalam aktualisasi strategi intervensi militernya ini, Rusia menargetkan kelompok-kelompok bersenjata yang dianggap sebagai 'teroris' yang berupaya melengserkan pemerintahan Assad. Faktanya langkah Rusia ini mendapat justifikasi melihat di barisan anti-pemerintah sendiri terdapat faksi al-Nusra¹ yang terafiliasi dengan jaringan Al Qaeda yang dituangkan oleh statemen Kementerian Luar Negeri Rusia:

"Generally, in fighting terrorists in Syria at the invitation of the legitimate Syrian government, Russia attacks not only ISIS targets but also the infrastructure and military capabilities of other terrorist groups, including Jabhat al Nusra, Al Qaeda's purported branch in Syria, which is probably the main group of this type." (The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, 2016)

Guna melemahkan kemampuan dari kelompok-kelompok bersenjata tersebut Rusia melakukan serangan terhadap target infrastruktur dan kapabilitas militer melalui serangan udara yang dilakukan lewat fasilitas militer Rusia di Latakia. Serangan terhadap target-target tersebut diyakini akan memberikan keunggulan agregat dalam situasi militer di Suriah yang akan berpihak terhadap pemerintah Assad. Perlu diketahui, fasilitas militer di Latakia dan Tartus berperan sebagai tulang punggung dari seluruh operasi militer Rusia di Suriah.

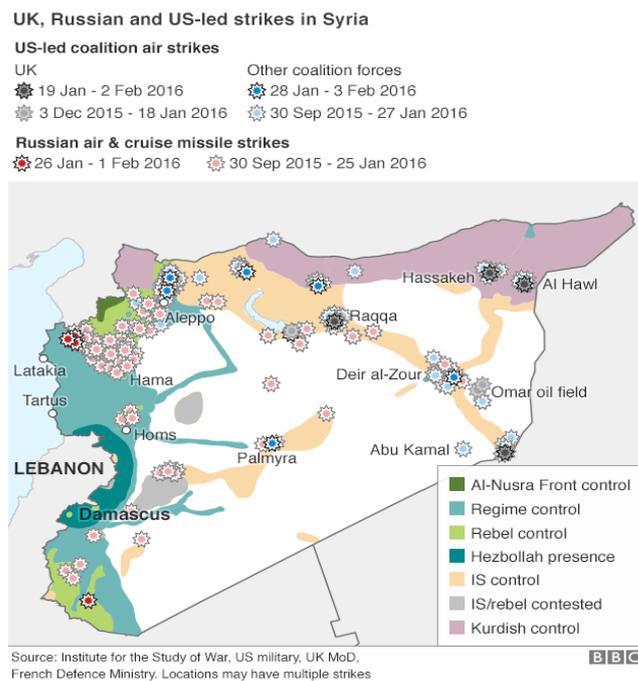
Pada permulaan intervensi militernya, serangan udara merupakan strategi andalan Rusia dalam mencapai sasaran yaitu melemahkan kelompok-kelompok

1 Dikenal sebelumnya sebagai "Jabhat al-Nusra" di awal konflik Suriah merupakan afiliasi al-Qaeda cabang Suriah. Kelompok ini masuk dalam daftar teroris sejumlah negara seperti AS, Rusia, EU dan PBB. Saat ini al-Nusra telah berganti nama menjadi Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) dengan gabungan beberapa faksi pemberontak lain yang kini menguasai sebagian besar provinsi Idlib.



bersenjata tersebut. Serangan udara ini melibatkan sejumlah postur alutsista seperti Su-25, Su-30 dan helikopter serbu Mi-8 dalam posisi *supporting-role* maupun *offensive-role* di lapangan. Ditinjau secara teknis, operasi militer Rusia ini dibagi dalam tiga tingkatan. Tingkatan pertama, *sorties*, dilakukan secara cepat dengan memobilisasi pesawat tempur dalam waktu singkat (10-20 menit) untuk reseptif terhadap krisis di garis depan. Tingkat kedua adalah *pre-planned attack* dimana serangan dilakukan menggunakan *guided missile* baik dari Su-24, Su-34 dan *platform* lain (UAV) ke target

asaran yang sudah ditentukan lewat data intelijen. Sedangkan tingkatan ketiga merupakan serangan presisi jarak jauh menggunakan *long-range bomber* dan *cruise-missile* dari pangkalan di Rusia. Serangan tingkat pertama dan kedua dilakukan sepenuhnya dari pangkalan militer Rusia di Suriah (Bodansky, 2016: 8). Adapun mengenai serangan udara Rusia tersebut ditunjukkan oleh gambar di samping ini.



Peta Serangan Udara Rusia di Suriah Periode 30 September 2015-1 Februari 2016.
 Sumber: www.bbc.com

Selama 30 September 2015 hingga 1 Februari 2016, terlihat serangan udara Rusia (merah) hampir sepenuhnya ditujukan ke basis-basis kubu oposisi, termasuk ISIS, mulai dari Latakia-Aleppo-Dara'a. Serangan dilakukan dengan pesawat maupun *cruise-missile*.

Intervensi militer Rusia mulai menunjukkan hasil dengan keberhasilan militer Suriah dalam merebut kembali sebagian provinsi Latakia dan kota *Syeikh Maskun* di Dara'a di awal tahun 2016 dari tangan kelompok anti-pemerintah. Kemenangan ini menandakan superioritas militer Rusia telah memindahkan inisiatif konflik ke tangan koalisi Rusia-Suriah-Iran. Perpindahan inisiatif ke koalisi Rusia ini berarti segala langkah militer dan arah peperangan akan ditentukan oleh Rusia dan koalisi, tidak lagi oleh faksi oposisi, apalagi ISIS. Kondisi ini menjadikan setiap langkah militer dari pihak oposisi dan ISIS menjadi *obsolete*, namun masih cukup berbahaya karena

mereka diketahui juga menggunakan metode non-konvensional seperti penculikan, penyanderaan, bom bunuh diri, dan sejenisnya.

Guna mengamankan kemenangan militer di lapangan dan memperkuat posisinya, Rusia turut 'memagari' wilayah Suriah dengan menggelar sejumlah persenjataan strategis seperti sistem pertahanan udara S-400 dan kapal jelajah berat (*heavy cruiser*) *Moskva*. Rusia menyadari bahwa postur militernya di Suriah adalah ofensif tanpa ada suatu 'payung perlindungan' dalam skenario defensif. Bertepatan dengan insiden penembakan pesawat Su-24 Rusia oleh Turki, pergelaran S-400 di Suriah diyakini dapat mencegah kemungkinan upaya skenario 'reverse' terhadap situasi yang ada oleh kekuatan eksternal. Sedangkan pergelaran *heavy cruiser* Moskva di perairan Latakia menjadi 'pagar' sekaligus *supporting-role* dalam mencegah kekuatan eksternal mendekat dari arah Laut Mediterannia. Pergelaran senjata strategis Rusia di Suriah ini sebenarnya menjadi bagian dari rangkaian jaringan *anti-area access denial* (A2/AD) dari Murmansk di Lingkaran Artik hingga Semenanjung Krimea di Laut Hitam kemudian berakhir di Latakia-Suriah yang digambarkan ilustrasi grafis di bawah ini.

Selain yang telah disebutkan, pada akhir November hingga Desember 2016 Rusia menggelar persenjataan strategis jenis *aircraft carrier* (kapal induk) Admiral Kuznetsov di perairan Mediterannia dekat Suriah. Admiral Kuznetsov menyediakan 15



Lokasi Penempatan Jaringan A2/AD milik Rusia.
Sumber: Institute for Study of War.

pesawat dalam 9 *sorties* per-harinya, jauh dibandingkan dengan angka *sorties* dari pangkalan Hmeimim yakni 40-42 *sorties*. Sangat diyakini partisipasi Admiral Kuznetsov dalam intervensi militer Rusia di Suriah telah memberikan dua capaian sekaligus, yakni proyeksi kekuatan di Mediterannia bersanding dengan kekuatan NATO sekaligus meningkatkan kapasitas operasi militernya di Suriah.

Keberadaan Admiral Kuznetsov ini bertepatan

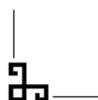
dengan dimulainya operasi pembebasan kota Aleppo guna mendobrak situasi *stalemate* di kota Aleppo dan sekelilingnya sejak awal 2016. Secara tidak langsung perkembangan situasi militer di lapangan membawa keunggulan militer mutlak di sisi Rusia-Suriah atas aliansi faksi pemberontak di kota Aleppo yang menyebabkan faksi pemberontak mau tidak mau harus menerima rekonsiliasi dengan pemerintah beserta persyaratannya (Atlantic Council, 2017). Kemenangan di kota Aleppo ini dimaknai sebagai 'simbol' kemenangan strategis Rusia-Suriah-Iran atas faksi pemberontak dan sponsornya mengingat nilai kota Aleppo yang sangat prestisius (pusat ekonomi).

Setelah mengamankan Aleppo, Rusia-Suriah memalingkan perhatian melawan ISIS. Sepanjang 2017, Rusia-Suriah memfokuskan untuk menghancurkan kekuatan ISIS yang menguasai wilayah Timur Suriah dengan mengebom 'jantung' dari mesin perang ISIS dari pabrik dan gudang bom-senjata hingga sumber finansialnya yakni sumur-sumur minyak. Rusia meyakini bahwa memprioritaskan hancurnya sumber daya ISIS akan melemahkan kemampuan dan kapasitas perang ISIS sehingga akan lebih mudah dalam mematahkan perlawanan mereka (Kofman & Rojansky, JD, 2018).

Sejumlah kubu pertahanan ISIS di timur Suriah meliputi Palmyra dan As-Sukhnah menjadi ' pijakan' membuka jalan membebaskan kota Deir Ez Zor yang telah lama dikepung ISIS. Bebasnya Deir Ez Zor kemudian dilanjutkan Rusia-Suriah membersihkan kubu pertahanan ISIS di sepanjang kota di tepi Sungai Eufrat (Al-Mayadin dan Abu Kamal) sampai ke perbatasan Suriah-Irak dalam dua poros serangan, Stasiun T2 dan Palmyra- As Sukhnah (Lavrov, 2018: 15-18). Operasi ini berhasil menetralkan ancaman kekuatan ISIS yang memaksa ISIS melanjutkan perang secara gerilya dalam intensitas kecil.

Dari Suriah Timur, Rusia mulai menekan faksi pemberontak di Ghouta timur. Intensnya serangan dari kantong pertahanan pemberontak di Ghouta timur ke Damaskus telah mengancam warga sipil. Hal ini disebabkan dekatnya jarak Ghouta timur ke Damaskus yang dapat dijangkau oleh senjata-senjata seperti roket, bom dan mortir. Dalam operasi di Ghouta timur ini Rusia berhasil menekan faksi pemberontak menyepakati skenario *settlement* untuk dipindahkan ke wilayah utara Suriah (Idlib-Jarabulus) yang dikontrol Turki (Lavrov, 2018: 19-20). Skenario ini memungkinkan Rusia-Suriah memindahkan kantong-kantong pemberontak yang terpencar ke dalam suatu 'kantong besar' pemberontak di utara Suriah.

Rangkaian keberhasilan di Aleppo, Suriah Timur dan Ghouta timur disusul dengan kesuksesan di provinsi Dara'a-Quneitra. Di Dara'a-Quneitra Rusia kembali



menekan faksi pemberontak guna menghentikan perlawanan sekaligus menerima kesepakatan rekonsiliasi. Bagi yang menerima akan diberikan amnesti, sementara untuk yang menolak akan direlokasi ke kantong pemberontak di utara Suriah (Idlib-Jarabulus) yang dikontrol oleh Turki. Kemenangan di Dara'a-Quneitra ini sangat menarik sebab Dara'a menjadi titik permulaan gerakan antipemerintah di awal 2011 silam. Kembalinya Dara'a-Quneira ke tangan pemerintah ini praktis telah mengeliminasi salah satu kawasan besar basis pemberontak sekaligus 'memukul' moral pemberontak. Dengan tereliminasi pemberontak di sana menyisakan faksi ISIS sebagai sasaran selanjutnya dari serangan Rusia-Suriah yang berujung pada kekalahan ISIS (International Crisis Group, 2018).

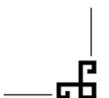
Perubahan situasi militer ini tidak lepas dari kontribusi penggunaan strategi serangan udara Rusia yang terhitung sejak 30 September 2015-22 Desember 2017 Rusia telah lakukan lewat *sorties* dengan capaian target sasaran hancur dalam rincian data di bawah ini.

Date	Sorties	Average per day	Targets hit
03.10.2015	60	15	50
22.10.2015	934	41	819
29.10.2015	1,391	46	1,623
16.11.2015	2,289	48	4,111
14.12.2015	4,201	55	n/a
24.12.2015	5,240	61	n/a
22.02.2016	11,700	80	22,000
22.12.2016	18,800	42	71,000
26.04.2017	23,000	40	77,000
25.08.2017	28,000	40	90,000
22.09.2017	30,650	42	96,828
22.12.2017	34,000	42	n/a

Data serangan udara Rusia sejak Oktober 2015 – Desember 2017.

Sumber: The Russian Air Campaign in Syria (Lavrov, 2018).

Data di atas memperlihatkan bahwa rata-rata *sorties* pesawat Rusia mengalami intensitas sejak akhir tahun 2015 hingga awal 2016 sebanyak 55-80 *sorties* perharinya. Pada periode tersebut bertepatan dengan operasi militer di provinsi Latakia dengan hasil kemenangan di kubu pemerintah Suriah seperti yang disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Jumlah *sorties* ini sejalan dengan meningkatnya target sasaran yang dihancurkan sampai dengan akhir Desember 2017. Hal ini memperkuat fakta bahwa superioritas militer Rusia lewat intervensi militernya telah melemahkan kapabilitas pemberontak dan ISIS untuk melanjutkan inisiatif jalannya perang sekaligus mengubah situasi yang kini berada di pihak pemerintah Suriah.



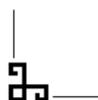
Perkembangan Politik Selama dan Pasca-Intervensi Militer Rusia di Suriah

Setelah intervensi militer Rusia memastikan perolehan kemenangan militer bagi pemerintah Assad, langkah selanjutnya adalah mengiringi kesuksesan tersebut lewat *peace settlement* berupa perundingan politik. Di tingkat internasional, Rusia aktif menginisiasi format multilateral dan bilateral bersama AS melalui kerangka ISSG (*International Syria Support Group*) yang didukung masyarakat internasional di Wina dan Munich. Dari kerangka ISSG ini, Rusia-AS berperan menjadi penjamin implementasi *cessation of hostilities* antara pemerintah dan oposisi di seluruh wilayah Suriah. Posisi Rusia-AS dalam kerangka ISSG ini guna memastikan terciptanya situasi kondusif untuk perundingan politik sekaligus menjadi momentum rekonsolidasi dan pemberian akses kemanusiaan. Seluruh pihak dukungan Rusia-AS sepakat gencatan senjata namun operasi militer melawan kelompok teroris tetap dilanjutkan secara terpisah (Rusia-Suriah-Iran dan AS-SDF). Namun format ISSG ini menghadapi kegagalan seutuhnya pada November 2016 ketika Rusia-Iran-Suriah memulai operasi militer merebut kota Aleppo (Araabi & Hilal, 2016).

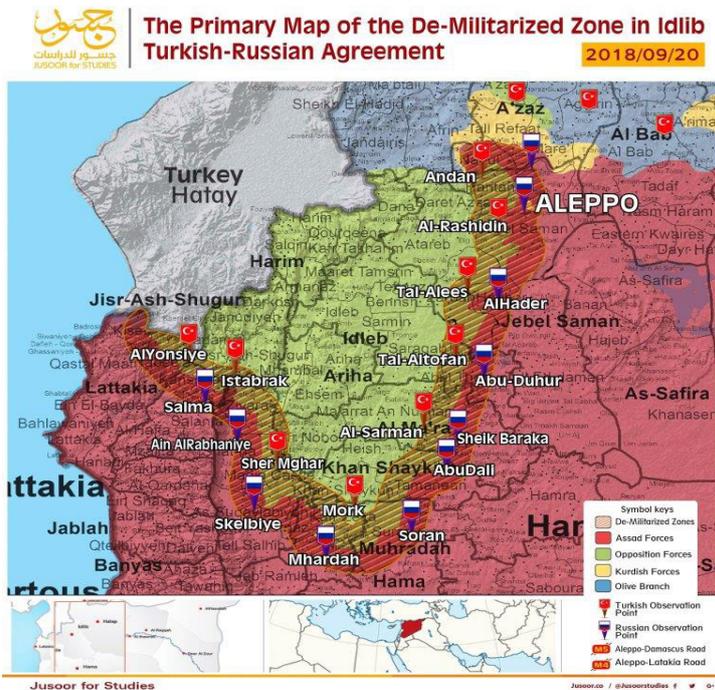
Gagalnya ISSG ini mendorong Rusia menginisiasi format Astana merangkul Iran-Turki lewat pendekatan *regional*. Rusia meyakini format Astana ini sebagai *platform* tepat merangkul aktor-aktor penting di Suriah. Format Astana yang berbasis regional ini menjadi komplementer di samping format ISSG di tataran internasional berdasarkan konfigurasi militer di lapangan sebagai landasan. Dengan format Astana ini, penentuan *sphere of influence* Rusia-Turki-Iran akan ditentukan tanpa melibatkan aktor lain seperti AS maupun negara-negara GCC (Stepanova, 2016).

Proses pembagian *sphere of influence* ini dilaksanakan melalui mekanisme pembuatan *de-escalation zone* di wilayah Aleppo-Hama-Idlib lewat Rusia-Turki-Iran sebagai *guarantor states*. Mekanisme ini dijalankan dengan cara membangun pos observasi di zona yang telah disepakati yakni Rusia-Iran di wilayah pemerintah dan Turki di wilayah pemberontak. Dengan dibuatnya *de-escalation zone* ini berguna untuk menjaga *status-quo* yang ada dengan mencegah kemungkinan salah satu pihak melakukan manuver militer yang mengancam perubahan *status-quo*.

Seiring perkembangan, eksistensi *de-escalation* ini tidak menghentikan serangan jarak jauh pemberontak melalui artileri, roket hingga *drone/UAV*. Perkembangan situasi ini menyebabkan *guarantor states* harus memperbaharui kerangka format Astana yang pada Agustus 2018 ditambahkan mekanisme *de-militarization zone* di sepanjang wilayah *status-quo existing* (Aleppo-Latakia-Idlib). Implementasi DMZ (*Demilitarized Zone*) ini dilakukan oleh pihak *guarantor states* melalui pemberian



instruksi ke seluruh faksi pemberontak dan pemerintah Suriah untuk menarik mundur persenjataan berat beserta seluruh personel bersenjata sejauh 10-20km dari garis depan yang menjadi *status-quo*. Untuk lebih jelasnya gambaran mengenai DMZ ini ditunjukkan melalui gambar di bawah ini.



Konfigurasi De-militarization Zone di Utara Suriah (Latakia-Idlib-Hama-Aleppo). Sumber: www.jusoor.co

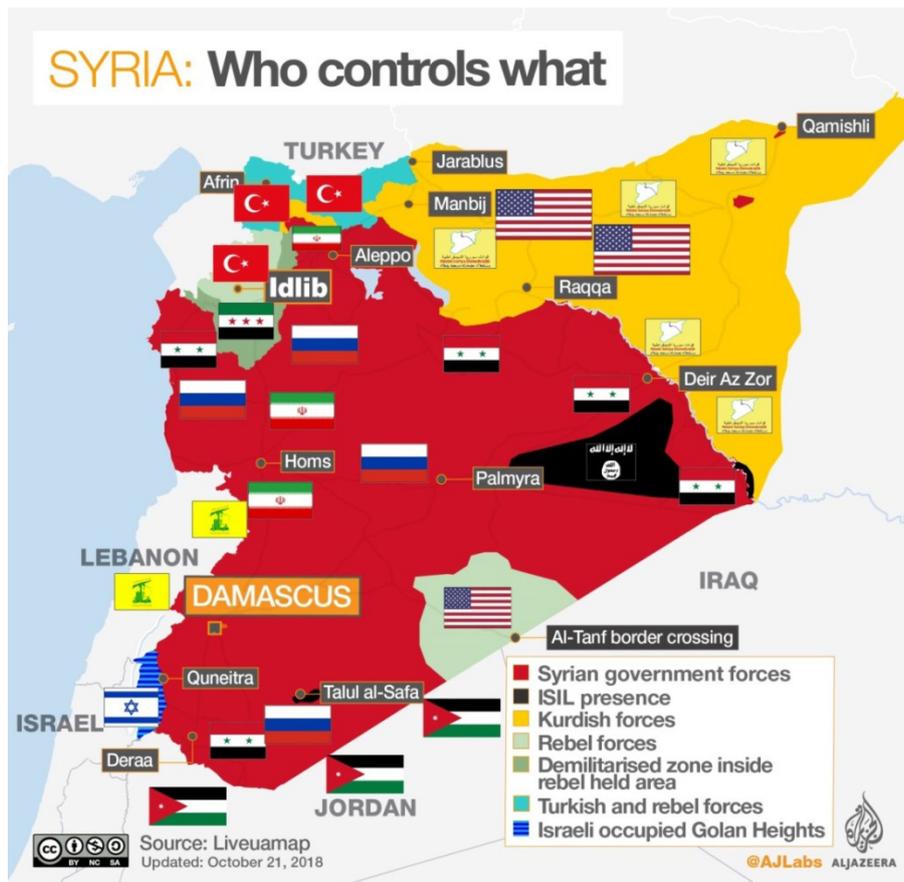
Selama pelaksanaan pihak *guarantor states* Rusia-Iran mengawasi di sisi wilayah pemerintah dan Turki di sisi wilayah pemberontak (United Nations Security Council, 2018). Ini ditunjukkan dalam simbol di gambar tersebut dimana Rusia-Iran-Turki berhadapan langsung di wilayah *status-quo*.

Di sisi selatan Suriah, Rusia telah dua kali menjajaki perundingan mengenai *de-escalation zone* melibatkan

AS-Yordania-Israel di Quneitra-Dara'a-Suweida sebagai sponsor utama pemberontak di kawasan tersebut. Pada perundingan pertama di Juli 2017, Rusia menyadari jika tercapai kesepakatan *de-escalation zone* akan membebaskan sumber daya militer Rusia dan pemerintah Suriah untuk menghadapi ISIS di front lain (International Crisis Group, 2018).

Di tahapan kedua yakni Juni-Juli 2018, Rusia berunding kembali kali ini bersama Israel-Yordania dengan hasil bahwa Rusia menjamin pergelaran operasi militer di Quneitra – Dara'a tidak melibatkan Iran dan proksinya dengan membatasi jarak 90-100 km dari perbatasan Israel-Yordania (Krasna, 2018). Yang menarik di tahapan kedua ini AS tidak memberikan jaminan bagi faksi pemberontak di kawasan tersebut, membiarkan pemberontak terancam operasi militer Rusia-Suriah. Tercapainya kesepakatan tersebut dan ketiadaan jaminan AS berhasil mendorong pemerintah Suriah menguasai kembali kawasan tersebut menyisakan kantong pertahanan ISIS sebagai problematika bersama Rusia-Israel-Yordania.

Dari fakta-fakta sebelumnya, intervensi militer Rusia telah ‘menggulung’ kekuatan oposisi dan ISIS di sejumlah front di Suriah dan mengembalikan wilayah yang sebelumnya diduduki ke pemerintah Suriah. Hal ini diikuti dengan upaya perundingan-perundingan secara multi-level oleh Rusia telah menghasilkan konfigurasi *status-quo* sejak September-Oktober 2018 ditunjukkan gambar di bawah ini.



Peta Kekuatan Politik di Suriah yang Diarsiteki Rusia.

Sumber: www.aljazeera.com dengan ubahan dari penulis.

Terlihat di peta, pengaruh AS dibatasi di wilayah SDF dan sekitar perbatasan Al Tanf di bawah faksi pemberontak. Sedangkan pengaruh Turki di utara Suriah (Afrin-Idlib-Jarabulus) di wilayah penguasaan T-FSA dan sejumlah faksi HTS. Untuk pengaruh Rusia sendiri memiliki cakupan wilayah terluas, yakni di seluruh wilayah pemerintah Suriah dari Latakia-Tartus-Quneitra-Dara'a-Quneitra-Aleppo-Palmyra-Deir Ez Zor-al Bukamal.

Hasil Intervensi Militer Rusia di Suriah dan Timur Tengah

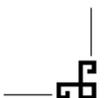
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, intervensi militer Rusia memang diiringi oleh upaya politik dari Rusia. Tentu kombinasi penggunaan instrumen

militer-politik ini diibaratkan seperti 'dua gambar dalam satu mata koin'. Kemenangan strategis militer di lapangan yang diamankan oleh mekanisme perundingan politik menghasilkan sejumlah konsekuensi nyata.

Pertama, dari intervensi militer tersebut Rusia telah meningkatkan daya tawarnya sebagai aktor kunci di Suriah. Posisi ini menyebabkan seluruh langkah pihak-pihak di Suriah mau tidak mau harus berkoordinasi dengan Rusia guna menghindari bentrokan. Seperti dalam pembagian wilayah operasi militer antara AS-Rusia di udara, menghasilkan suatu kesepakatan dimana AS mengontrol wilayah udara di sisi Timur Sungai Eufrat sampai ke kota Manbij. Sementara itu, Rusia mengontrol sisanya yang mencakup hampir 3/4 ruang udara Suriah. Secara tidak langsung, pembagian ini membuat AS dan sekutunya tidak lagi dapat bebas bermanuver penuh di udara. Selain itu, Rusia juga diikutsertakan dalam berbagai pembicaraan penyelesaian konflik di Suriah.

Sedangkan di tingkat kawasan, intervensi militer Rusia telah membuka jalan format *ad hoc* 4+1 kerjasama intelijen antiteroris merangkul Iran-Irak-Suriah dan Hezbollah (Lebanon) yang dibentuk di Baghdad pada September 2015. Format kerjasama ini secara tidak langsung telah menggeser posisi AS sebagai sekutu utama negara-negara di kawasan dalam kampanye antiterorisme, khususnya di Irak yang telah lama berjuang menghadapi ketidakpastian keamanan akibat perkembangan kelompok teroris (Agence France-Presse, 2018). Mundurnya AS dari Irak 2011 dan destabilisasi kawasan oleh *Arab Spring* yang memberi ruang ekspansi bagi entitas *pseudo-states* (ISIS, Al-Qaeda, dan sejenisnya) untuk melebarkan pengaruhnya memunculkan sejumlah pertanyaan akan efektivitas koalisi anti-terorisme pimpinan AS di kawasan.

Yang menarik dalam format kerjasama ini Rusia merangkul aktor-aktor seperti Iran dan Hezbollah yang tidak tergabung di koalisi antiterorisme pimpinan AS untuk ikut serta guna memposisikan Iran-Hezbollah sebagai kekuatan efektif di sisi Rusia. Kerjasama *ad hoc* 4+1 ini menjadi koalisi antiterorisme berbasis regional jika dibanding dengan koalisi antiterorisme AS yang berbasis internasional (melibatkan hampir seluruh masyarakat internasional). Dengan kata lain, kerjasama *ad hoc* 4+1 ini secara tersirat menjadi penyeimbang bagi koalisi antiterorisme AS di Timur Tengah sekaligus menjadi pilihan menarik yang tidak dapat dilewatkan bagi negara-negara di kawasan Timur Tengah non-koalisi AS (Iran-Suriah) maupun yang tergabung di koalisi AS seperti Irak.



Fakta lainnya keikutsertaan Rusia lewat intervensi militernya di Suriah menciptakan formasi aliansi transnasional yang mengedepankan Rusia sebagai kekuatan eksternal dengan kekuatan kawasan (Turki-Iran-Israel), kekuatan lokal (Yordania-Lebanon) dan kekuatan internal (pemerintah Suriah-pemberontak). Keseluruhan interaksi dilakukan Rusia dengan menggunakan pendekatan diplomasi guna menopang operasi militernya di Suriah bersama pemerintah Suriah. Pendekatan diplomasi ke negara-negara kawasan ini sangat penting mengingat proses penyelesaian konflik di Suriah tidak dapat dilakukan secara unilateral akibat kompleksnya aktor dan kepentingan di sana.

Rusia merangkul Iran dan Turki dalam format Astana untuk menciptakan *status-quo* di sebelah utara Suriah. Hal ini dikarenakan Iran dan Turki yang memiliki posisi kuat di Suriah lewat jaringan milisi dan proksi-proksinya tersebar di seluruh wilayah Suriah. Iran memayungi milisi-milisi Syiah sedangkan Turki memayungi milisi-milisi berhaluan Islamis ekstrem. Bersama kekuatan kawasan, Rusia turut serta mengajak kekuatan lokal (Yordania-Lebanon) dalam perundingan terpisah yang mengambil *setting* di sebelah selatan Suriah. Interaksi Rusia-Yordania-Lebanon bertujuan mengajak kekuatan tersebut untuk mengambil peran dalam proses politik-militer yang sedang berlangsung mengingat posisinya sebagai *gateway* bagi milisi bersenjata sekaligus konsentrasi kantong-kantong pengungsi Suriah terbesar setelah Turki (Al-Khalidi, 2018).

Selain dengan aktor negara, partisipasi aktif Rusia di Suriah juga menjalin interaksi dengan entitas non-negara seperti Kurdi meski di saat yang sama Rusia mendukung pemerintah Assad. Interaksi Rusia-Kurdi ini menunjukkan intensi Rusia dalam membendung arus pelarian ISIS beserta dukungannya dari dan ke Suriah. Di saat bersamaan memburuknya hubungan Rusia-Turki paska penembakan jatuh Su-24 Rusia telah memalingkan Rusia untuk memperkuat kemitraan transnasionalnya ke Kurdi guna melemahkan Turki-ISIS sekaligus melalui Kurdi (Kausch, 2017).

Interaksi-interaksi yang telah disebutkan sebelumnya membuktikan adanya formasi interaksi keamanan di Timur Tengah dalam kompleksitas lapisan berbeda, yakni kekuatan global (Rusia-AS), kekuatan kawasan (Saudi-Iran) dan kekuatan lokal (Suriah-Yordania-Lebanon-FSA-ISIS-SDF). Intervensi militer Rusia di Timur Tengah telah mempertemukan Rusia dengan AS sebagai 'rival lama' di kawasan. Artinya kembalinya Rusia di Timur Tengah di samping hegemoni AS di kawasan berupaya melangsungkan eksistensinya di Timur Tengah dengan melakukan penyesuaian terhadap perkembangan dinamika di kawasan guna mencapai kepentingan nasional



keduanya. Kepentingan dan peranan AS-Rusia di Timur Tengah ini menyebabkan isu keamanan di kawasan tersebut menjadi perhatian masyarakat internasional.

Maka dengan rangkaian fakta tersebut, Rusia telah memperoleh posisi di Timur Tengah dalam beberapa bagian penting di Suriah sekaligus membangun eksistensi lewat kemitraan strategis dengan Turki-Iran-Suriah, juga mengikutsertakan Irak-Mesir. Meskipun langkah intervensi militer Rusia di Suriah ini tidak menjadikannya memiliki pengaruh di seluruh Timur Tengah, setidaknya Rusia memperoleh sejumlah pijakan baru di kawasan, mengakhiri hegemoni AS di kawasan seperti ditunjukkan peta di bawah ini



Perubahan Konstelasi Keamanan di Timur Tengah paska-Intervensi Militer Rusia

Peta tersebut menunjukkan intervensi militer Rusia di Suriah sedikit banyak telah mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan Timur Tengah. Jika dahulu AS sebagai kekuatan global hegemon di Timur Tengah, kini ia telah memperoleh 'penantang baru' dengan hadirnya peranan Rusia lewat intervensi militernya di Suriah. Dengan kata lain, mulai terjadi *balance of power* di antara sesama kekuatan global (AS-Rusia) melalui "jejaring benang" pengaruhnya ke negara-negara di Timur Tengah.

Kesimpulan

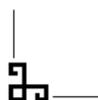
Timur Tengah telah membuktikan statusnya sebagai kawasan *volatile* dalam dinamika perpolitikan internasional melalui adanya polaritas konflik dari interaksi *enmity-amity* negara-negara di dalamnya dimana polaritas tersebut silih berganti menjadi episentrum keamanan di kawasan tersebut. Kemunculan *Arab Spring* telah menjadi titik episentrum keamanan baru di Timur Tengah yang membuka babakan baru dengan keterlibatan kekuatan kawasan dipimpin Saudi-Iran yang salah satunya mengambil *setting* di Suriah sebagai arena kontestasi kekuatan. Konflik di Suriah ini menginterkoneksi kekuatan global di dalamnya yakni AS dan Rusia.

Melalui intervensi militer, Rusia telah membuktikan superioritas sekaligus kapabilitas militernya dalam mengubah jalannya arah perang di Suriah dari yang hampir menyebabkan pemerintah Assad runtuh menjadi kuat kembali. Pergelaran sejumlah senjata strategis sangat berperan andil mengembalikan institusi negara Suriah dan menjadi salah satu kunci guna menyediakan landasan negosiasi peta politik di Suriah didukung perundingan jalur diplomatik bilateral-trilateral-multilateral antara Rusia dengan seluruh aktor di kawasan. Perundingan diplomatik ini membuktikan peranan penting Rusia di Suriah, yaitu bahwa Rusia mampu mendikte proses politik di Suriah dengan membentuk *status-quo* ke dalam tiga zona pengaruh: pro-AS (wilayah SDF di *Al-Tanf*), pro-Turki (FSA di Idlib-Afrin) dan pro-Rusia dan Iran (wilayah pemerintah Suriah).

Di tingkat regional, intervensi Rusia ini membuka formasi transnasional dengan merangkul berbagai aktor mulai dari negara hingga non-negara yang menjadikan Rusia mitra alternatif di kawasan. Sangat diyakini kehadiran Rusia ini juga memaksa AS untuk berbagi peranan yang secara tidak langsung telah menurunkan hegemoninya di kawasan sekaligus menggagalkan aktualisasi *blueprint* tatanan keamanan Timur Tengah versi AS. Di samping itu, eksistensi Rusia lewat intervensi militer dan interaksi diplomatik di Timur Tengah turut menaikkan pamor Rusia di kancah politik internasional dan di negara-negara Timur Tengah.

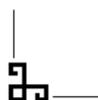
Daftar Pustaka

Agence France-Presse. (2018, April 19). Iran, Iraq, Syria, Russia hold 'anti-terrorism' meet. *The Jakarta Post*, [online] Dalam: <https://www.thejakartapost.com/news/2018/04/19/iran-iraq-syria-russia-hold-anti-terrorism-meet-.html>. [Diakses 18 Maret 2019]



- Alikani, M., dan Zakerian, M. (2016). Study of Factors Affecting Saudi-Iranian Relations and Conflicts and Their Resulting Behavior Pattern. *Journal of Politics and Law*, 178-183.
- Al-Khalidi, S. (2018, November 9). Jordan says in talks with U.S and Russia to Dismantle Syria camp. *Reuters*, [online] Dalam: <https://uk.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-syria-camp/jordan-says-in-talks-with-u-s-and-russia-to-dismantle-syria-camp-idUKKCN1ND31C>. [Diakses 6 April 2019].
- Allison, R. (2013). Russia and Syria: Explaining Alignment with a Regime in Crisis. *International Affairs*, 89, 795-823.
- Araabi, S., dan Hilal, L. (2016). *Reconciliation, Reward and Revenge: Analyzing Syria De-escalation Zone Dynamics Through Local Ceasefire Negotiations*. Berlin: Berghof Foundation.
- Atlantic Council. (2017). *Breaking Aleppo*. Washington DC: Atlantic Council.
- Benmelech, E., dan Klor, E. F. (2018). What Explains the Flow of Foreign Fighters to ISIS.
- Bodansky, Y. (2016). The Evolution of Russian, Syrian and Iranian Actions Against the Jihadist Movements. *ISPW Strategy Series: Focus on Defense and International Security*.
- Buzan, B., dan Waever, O. (2003). *Regions and Power*. (T. J. Steve Smith, Penyunt.) Cambridge: Cambridge University Press.
- Choucair, S. (2013). *The Syrian Battle of al-Qusayr: Domestic and Regional Consequences of Hezbollah's Intervention*. Al Jazeera Center for Studies.
- Conflict Armament Research. (2017). *Weapons of the Islamic States*. London: Conflict Armament Research.
- Fetherston, A., (2000). Conflict Resolution and Peacebuilding: A reconsideration of theoretical frameworks. *International Peacekeeping*, 7(1), 190-218.
- Gent, S. (2008). Going in When it Counts: Military Intervention and the Outcome of Civil Conflict. *International Studies Quarterly*, 52, 713-735.
- Gray, M. (2014). *Global Security Watch—Saudi Arabia*. Santa Barbara-California: ABC-CLIO,LLC.

- Hadar, L. (2005). *Sandstorm: Policy Failure in the Middle East* (1st ed.). Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Hazbun, W. (2018). Regional Powers and Production of Insecurity in the Middle East. *MENARA Working Papers*.
- International Crisis Group . (2018). *Keeping the Calm in Southern Syria*. Brussels: International Crisis Group.
- Jan Joel Andersson, F. G. (2015). *Adding fuel to the fire? Arming the Kurds*. European Union Institute for Security Studies.
- Kausch, K. (2017). State and Non-State Alliances in the Middle East. *The International Spectator*.
- Kofman, M., dan Rojansky, JD, M. (2018, Maret-April). What Kind of Victory for Russia in Syria?. *Army University Press*, [online] Dalam: <https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/English-Edition-Archives/March-April-2018/Rojansky-Victory-for-Russia/> [Diakses 26 Januari 2019].
- Kompaniets, O. V. (2016). Military Intervention as Foundation. *Actual Problems of International Relations*, 57-67.
- Krasna, J. (2018). Moscow on the Mediterranean: Russia and Israel's Relationship. *Russia Foreign Policy Papers*.
- Lavrov, A. (2018). *The Russian Air Campaign in Syria*. New York: CNA Analysis and Solutions.
- Machairas, D. (2017). The Strategic and Political Consequences. *Cogent Social Sciences*, 3(1299555), 1-9.
- Makdisi, K. (2018). Palestine and the Arab-Israeli Conflict: 100 years of Regional Relevance and International Failure. *MENARA Working Papers*.
- Mann, Y. (2017). The Middle East and the New Era in the World Oil Market. *The Journal for Interdisciplinary Middle Eastern Studies*, 105-125.
- Marks, J. (2018, September 14). History Stories: Why Is There a Civil War in Syria?. *History.com*, [online] Dalam: <https://www.history.com/news/syria-civil-war-assad-rebels> [Diakses 26 Januari 2019].



- Nolte, G. (2011). Intervention by Invitation. In *Encyclopedia of Public International Law* (pp. 1-8). Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg and Oxford University Press.
- Shaheen, K. (2015). The Guardian: String of losses in Syria leaves Assad regime increasingly precarious. *The Guardian*, [online] Dalam: <https://www.theguardian.com/world/2015/jun/11/syria-losses-east-assad-regime-precarious> [Diakses 31 Agustus 2018].
- Sinan al-Hawat, W. E. (2015). Syria - Civilian interaction with armed groups in the Syrian conflict. *Accord* (1), 30.
- Soage, A. B. (2017). What is Really Behind the Saudi-Iranian Cold War?
- Stepanova, E. (2016). Does Russia Have a Grand Plan for the Middle East? *Politique étrangère*, 23-35.
- Strack, C. (2015). *Syrian government no longer controls 83% of the country* | *Jane's 360*. [online] Dalam: <https://www.janes.com/article/53771/syrian-government-no-longer-controls-83-of-the-country> [Diakses 31 Agustus 2018].
- Sullivan, P. L., dan Koch, M. T. (2009). Military Intervention by Powerful States 1945-2003. *Journal of Peace Research*, 1-25.
- The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. (2016, Februari 09). Deputy Foreign Minister Oleg Syromolotov's interview with Rossiya Segodnya news agency, February 9, 2016. *The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation*, [online] Dalam: http://www.mid.ru/en/about/professional_holiday/news/-/asset_publisher/I5UF6lkPfgKO/content/id/2068238 [Diakses 31 Agustus 2018].
- Tillema, H. K., dan Wingen, J. R. (1982). Law and Power in Military Intervention. *International Studies Quarterly*, 26(2), 220-247.
- United Nations Security Council. (2018, Oktober 23). Implementation of Security Council Resolutions. *United Nations Security Council*, [online] Dalam: <https://undocs.org/S/2018/947> [Diakses 4 Maret 2019].
- Wallsh, D. (2013). Syrian Alliance Strategy in the Post-Cold War Era: The Impact of Unipolarity. *The Fletcher Forum of World Affairs*, 37(2), 107-123.
- Zyvagelskaya, I. (2016). Russia, the New Protagonist in the Middle East. Dalam A. Ferarri, *Putin's Russia: Really Back?* (hal. 73-91). Milan: Ledizioni LediPublishing.

